



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN DAFTAR
PROYEK STRATEGIS NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas daftar Proyek Strategis Nasional dan/atau usulan Proyek Strategis Nasional serta untuk mengakomodasi perkembangan dan kepastian hukum dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Proyek Strategis Nasional maka diperlukan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional dan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
4. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 363);
5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
6. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 688);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL.**

Pasal I

Daftar Proyek Strategis Nasional dalam Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 688) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2022

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1260

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



I Ketut Hadi Priatna
NIP 197405071999031002

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN DAFTAR PROYEK
STRATEGIS NASIONAL

PERUBAHAN DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL

I. PROYEK

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
A. Sektor Jalan dan Jembatan		
1.	Jalan Tol Serang - Panimbang	Provinsi Banten
2.	Jalan Tol Pandaan - Malang	Provinsi Jawa Timur
3.	Jalan Tol Manado - Bitung	Provinsi Sulawesi Utara
4.	Jalan Tol Balikpapan - Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur
5.	Jalan Tol Medan - Binjai - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Utara
6.	Jalan Tol Pekanbaru - Kandis - Dumai - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Riau
7.	Jalan Tol Kisaran - Tebing Tinggi - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Utara
8.	Jalan Tol Sigli - Banda Aceh - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Aceh
9.	Jalan Tol Binjai - Langsa - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Aceh dan Sumatera Utara
10.	Jalan Tol Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Barat
11.	Jalan Tol Rantau Prapat - Kisaran - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Utara
12.	Jalan Tol Langsa - Lhokseumawe - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Aceh

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
13.	Jalan Tol Lhokseumawe - Sigli - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Aceh
14.	Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau
15.	Jalan Tol Tebing Tinggi - Pematang Siantar - Prapat - Tarutung - Sibolga - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Utara
16.	Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) - Tempino - Jambi - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan
17.	Jalan Tol Jambi - Rengat - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Jambi dan Riau
18.	Jalan Tol Rengat - Pekanbaru - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Riau
19.	Jalan Tol Dumai - Sp. Sigambal - Rantau Prapat - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Utara
20.	Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Selatan
21.	Jalan Tol Muara Enim - Lahat - Lubuk Linggau - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Selatan
22.	Jalan Tol Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu
23.	Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung	Provinsi Sumatera Selatan
24.	Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan	Provinsi Jawa Barat
25.	Jalan Tol Ciawi - Sukabumi - Ciranjang - Padalarang	Provinsi Jawa Barat
26.	Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran	Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan Provinsi Banten
27.	Jalan Tol Serpong - Cinere	Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat
28.	Jalan Tol Cinere - Jagorawi	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
29.	Jalan Tol Cimanggis - Cibitung	Provinsi Jawa Barat
30.	Jalan Tol Cibitung - Cilincing	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
31.	Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
32.	Jalan Tol Serpong - Balaraja	Provinsi Banten
33.	Jalan Tol Semanan - Sunter - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
34.	Jalan Tol Sunter - Pulo Gebang - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
35.	Jalan Tol Duri Pulo - Kampung Melayu - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
36.	Jalan Tol Kemayoran - Kampung Melayu - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
37.	Jalan Tol Ulujami - Tanah Abang - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
38.	Jalan Tol Pasar Minggu - Casablanca - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
39.	Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo	Provinsi Jawa Timur
40.	Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi (Target Penyelesaian Tahun 2024 Ruas Jalan Tol Probolinggo - Besuki)	Provinsi Jawa Timur
41.	Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar	Provinsi Jawa Timur
42.	Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Sisi Selatan	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
43.	Jalan Tol Semarang - Demak	Provinsi Jawa Tengah
44.	Jalan Tol Yogyakarta - Bawen	Provinsi Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah
45.	Pembangunan <i>Fly Over</i> dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong	Provinsi Jawa Timur
46.	Jalan Tol Ngawi - Kertosono - Kediri	Provinsi Jawa Timur
47.	Jalan Tol Depok - Antasari (termasuk Bojonggede - Salabenda)	Provinsi Jawa Barat
48.	Jalan Tol Solo - Yogyakarta - Kulon Progo	Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi D.I. Yogyakarta
49.	Jalan Tol Bogor <i>Ring Road</i> (termasuk Caringin - Salabenda)	Provinsi Jawa Barat
50.	Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap (Target Penyelesaian Tahun 2024 Ruas Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya)	Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
51.	Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban	Provinsi Jawa Barat
52.	Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk - Negara - Pekutatan - Soka - Mengwi	Provinsi Bali
53.	Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/ <i>New Priok Eastern Access</i> (NPEA)	Provinsi DKI Jakarta
B. Sektor Pelabuhan		
54.	Pelabuhan KEK Maloy	Provinsi Kalimantan Timur
55.	Pelabuhan Sanur - Nusa Ceningan/Lembongan	Provinsi Bali
56.	Pelabuhan Likupang	Provinsi Sulawesi Utara
57.	Makassar <i>New Port</i>	Provinsi Sulawesi Selatan
58.	Terminal <i>Multipurpose</i> Labuan Bajo	Provinsi Nusa Tenggara Timur
59.	Pembangunan Pelabuhan Patimban	Provinsi Jawa Barat
60.	Pengembangan Pelabuhan Terminal Kijing	Provinsi Kalimantan Barat
61.	Pengembangan Pelabuhan Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur
62.	Pengembangan Pelabuhan Sorong	Provinsi Papua Barat
63.	Pengembangan Pelabuhan Teluk Palu	Provinsi Sulawesi Tengah
64.	Pengembangan Pelabuhan <i>Hub</i> Internasional Kuala Tanjung	Provinsi Sumatera Utara
65.	Pengembangan Pelabuhan <i>Hub</i> Internasional Bitung	Provinsi Sulawesi Utara
66.	Pengembangan Pelabuhan Benoa (<i>Bali Maritime Tourism Hub</i>)	Provinsi Bali
67.	Pembangunan Pelabuhan Ambon Baru/ <i>New Ambon</i>	Provinsi Maluku
68.	Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru/ <i>New Palembang</i>	Provinsi Sumatera Selatan
69.	Pembangunan Pelabuhan Terminal Peti Kemas Muaro Jambi	Provinsi Jambi

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
C. Sektor Bandar Udara		
70.	Bandar Udara Baru Yogyakarta - Kulon Progo	Provinsi D.I. Yogyakarta
71.	Bandar Udara Kediri	Provinsi Jawa Timur
72.	Bandar Udara Komodo - Labuan Bajo	Provinsi Nusa Tenggara Timur
73.	Pengembangan Bandar Udara Internasional Lombok Praya	Provinsi Nusa Tenggara Barat
74.	Pembangunan Bandar Udara Nabire Baru	Provinsi Papua
75.	Pembangunan Bandar Udara Siboru Fak Fak	Provinsi Papua Barat
D. Sektor Kereta		
76.	Kereta Api Makassar - Parepare (Tahap I dari Pengembangan Jalur Lintas Barat Sulawesi Bagian Selatan)	Provinsi Sulawesi Selatan
77.	Kereta Api Tebing Tinggi - Kuala Tanjung (mendukung KEK Sei Mangkei, bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera)	Provinsi Sumatera Utara
78.	Kereta Api Rantau Prapat - Kota Pinang	Provinsi Sumatera Utara
79.	Kereta Api Akses Bandar Udara Baru Yogyakarta - Kulon Progo	Provinsi D.I. Yogyakarta
80.	Kereta Api Jakarta - Surabaya	Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur
81.	<i>Double Track</i> Jawa Selatan	Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I. Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur
82.	<i>High Speed Railway</i> Jakarta - Bandung	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
83.	Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ <i>Light Rail Transit</i> (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi	Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
84.	Kereta Api Logistik Lahat - Muara Enim - Prabumulih - Tarahan/Lampung dan Prabumulih - Kertapati/Palembang	Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung
85.	Infrastruktur Kereta Api Logistik di Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur
86.	<i>Light Rail Transit</i> (LRT) Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang)	Provinsi Sumatera Selatan

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
87.	<i>Light Rail Transit (LRT) Jakarta International Stadium - Kelapa Gading dan Velodrome - Manggarai</i>	Provinsi DKI Jakarta
88.	Jakarta <i>Mass Rapid Transit (MRT) North - South</i> (Bundaran HI - Kota - Ancol Barat)	Provinsi DKI Jakarta
89.	<i>Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta East - West Phase I</i>	Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat
E. Sektor Kawasan		
90.	Kawasan Industri Kuala Tanjung	Provinsi Sumatera Utara
91.	Kawasan Industri Landak	Provinsi Kalimantan Barat
92.	Kawasan Industri Ketapang	Provinsi Kalimantan Barat
93.	Kawasan Industri Tanggamus	Provinsi Lampung
94.	Kawasan Industri Jorong	Provinsi Kalimantan Selatan
95.	Kawasan Industri Bantaeng	Provinsi Sulawesi Selatan
96.	Kawasan Industri Morowali	Provinsi Sulawesi Tengah
97.	Kawasan Industri Konawe	Provinsi Sulawesi Tenggara
98.	Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Teluk Bintuni	Provinsi Papua Barat
99.	Kawasan Industri Tanah Kuning	Provinsi Kalimantan Utara
100.	Kawasan Industri Wilmar Serang	Provinsi Banten
101.	Kawasan Industri Pulau Obi	Provinsi Maluku Utara
102.	Kawasan Industri Weda Bay	Provinsi Maluku Utara
103.	Kawasan Industri Takalar	Provinsi Sulawesi Selatan
104.	Kawasan Industri Tanjung Enim	Provinsi Sumatera Selatan
105.	Kawasan Terintegrasi Bakauheni	Provinsi Lampung
106.	Kawasan Industri Terpadu Batang	Provinsi Jawa Tengah

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
107.	Kawasan Industri Indonesia Konawe Industrial Park (IKIP)	Provinsi Sulawesi Tenggara
108.	Kawasan Industri Tanjung Sauh	Provinsi Kepulauan Riau
109.	Kawasan Industri Indonesia Pomalaa Industry Park	Provinsi Sulawesi Tenggara
110.	Kawasan Industri Motui	Provinsi Sulawesi Tenggara
111.	Kawasan Industri Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara
112.	Kawasan Industri Pulau Ladi	Provinsi Kepulauan Riau
113.	Kawasan Industri Pupuk Fakfak	Provinsi Papua Barat
F. Sektor Perumahan		
114.	Pembangunan Rumah Susun	Provinsi DKI Jakarta
115.	Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya	Nasional
G. Sektor Bendungan dan Irigasi		
116.	Bendungan Marangkayu	Provinsi Kalimantan Timur
117.	Bendungan Kuningan	Provinsi Jawa Barat
118.	Bendungan Bendo	Provinsi Jawa Timur
119.	Bendungan Gongseng	Provinsi Jawa Timur
120.	Bendungan Tukul	Provinsi Jawa Timur
121.	Bendungan Pidekso	Provinsi Jawa Tengah
122.	Bendungan Tugu	Provinsi Jawa Timur
123.	Bendungan Karalloe	Provinsi Sulawesi Selatan
124.	Bendungan Keureuto	Provinsi Aceh
125.	Bendungan Tapin	Provinsi Kalimantan Selatan
126.	Bendungan Passeloreng	Provinsi Sulawesi Selatan
127.	Bendungan Lolak	Provinsi Sulawesi Utara
128.	Bendungan Bintang Bano	Provinsi Nusa Tenggara Barat
129.	Bendungan Karian	Provinsi Banten

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
130.	Bendungan Rukoh dan Bangunan Pengarah Bendungan Rukoh	Provinsi Aceh
131.	Bendungan Way Sekampung	Provinsi Lampung
132.	Bendungan Kuwil Kawangkoan	Provinsi Sulawesi Utara
133.	Bendungan Ladongi	Provinsi Sulawesi Tenggara
134.	Bendungan Ciawi	Provinsi Jawa Barat
135.	Bendungan Sukamahi	Provinsi Jawa Barat
136.	Bendungan Leuwikeris	Provinsi Jawa Barat
137.	Bendungan Cipanas	Provinsi Jawa Barat
138.	Bendungan Tiga Dihaji	Provinsi Sumatera Selatan
139.	Bendungan Semantok	Provinsi Jawa Timur
140.	Bendungan Pamukkulu	Provinsi Sulawesi Selatan
141.	Bendungan Bener	Provinsi Jawa Tengah
142.	Bendungan Sadawarna	Provinsi Jawa Barat
143.	Bendungan Lausimeme	Provinsi Sumatera Utara
144.	Bendungan Sidan	Provinsi Bali
145.	Bendungan Marga Tiga	Provinsi Lampung
146.	Bendungan Bagong	Provinsi Jawa Timur
147.	Bendungan Randugunting	Provinsi Jawa Tengah
148.	Bendungan Mbay	Provinsi Nusa Tenggara Timur
149.	Bendungan Bulango Ulu	Provinsi Gorontalo
150.	Bendungan Napun Gete	Provinsi Nusa Tenggara Timur
151.	Bendungan Temef	Provinsi Nusa Tenggara Timur
152.	Bendungan Way Apu	Provinsi Maluku
153.	Bendungan Meninting	Provinsi Nusa Tenggara Barat
154.	Bendungan Tamblang	Provinsi Bali
155.	Bendungan Beringin Sila	Provinsi Nusa Tenggara Barat

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
156.	Bendungan Tiu Suntuk	Provinsi Nusa Tenggara Barat
157.	Bendungan Manikin	Provinsi Nusa Tenggara Timur
158.	Bendungan Jlantah	Provinsi Jawa Tengah
159.	Bendungan Jragung	Provinsi Jawa Tengah
160.	Bendungan Sepaku Semoi	Provinsi Kalimantan Timur
161.	Bendungan Budong-Budong	Provinsi Sulawesi Barat
162.	Bendungan Ameroro	Provinsi Sulawesi Tenggara
163.	Bendungan Karangnongko	Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur
164.	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lhok Guci	Provinsi Aceh
165.	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jambo Aye Kanan	Provinsi Aceh
166.	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lematang	Provinsi Sumatera Selatan
167.	Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Baliase	Provinsi Sulawesi Selatan
168.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Gumbasa	Provinsi Sulawesi Tengah
169.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rentang	Provinsi Jawa Barat
170.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Glapan	Provinsi Jawa Tengah
171.	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lempuing	Provinsi Sumatera Selatan
H. Sektor Air Bersih dan Sanitasi		
172.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat	Provinsi Jawa Tengah
173.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatigede	Provinsi Jawa Barat
174.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan	Provinsi Jawa Timur
175.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung	Provinsi Lampung
176.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II	Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
177.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur	Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta
178.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Wosusokas	Provinsi Jawa Tengah
179.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian - Serpong	Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta
180.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kamijoro (Bantul, Kulon Progo)	Provinsi D.I. Yogyakarta
181.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Benteng - Kobema (Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma)	Provinsi Bengkulu
182.	Sistem Penyediaan Air Baku Bendungan Sidan	Provinsi Bali
183.	Sarana dan Prasarana Air Baku Karian	Provinsi Banten
184.	Jakarta <i>Sewerage System</i> (JSS)	Provinsi DKI Jakarta
I. Sektor Tanggul Pantai		
185.	Tanggul Pantai	Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten
J. Sektor Energi		
186.	Kilang Minyak Tuban (Ekspansi)	Provinsi Jawa Timur
187.	<i>Upgrading</i> Kilang-Kilang Eksisting/ <i>Refinery Development Master Plan</i> (RDMP)	Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Selatan
188.	<i>Upgrading</i> Kilang Eksisting (RDMP) dan Industri Petrokimia Balongan	Provinsi Jawa Barat
189.	Konstruksi Tangki Penyimpanan BBM	Indonesia Bagian Timur
190.	Konstruksi Tangki Penyimpanan LPG	Indonesia Bagian Timur
191.	Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela	Provinsi Maluku
192.	Pengembangan Lapangan Gendalo, Maha, Gandang, Gehem, dan Bangka (Indonesia <i>Deepwater Development Project/IDD</i>)	Provinsi Kalimantan Timur
193.	Proyek Tangguh LNG <i>Train 3</i>	Provinsi Papua Barat
194.	Pengembangan Lapangan Unitisasi Gas Jambaran - Tiung Biru	Provinsi Jawa Timur
195.	Pembangunan Jaringan Gas Kota	Nasional

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
196.	Pembangunan Transmisi Pipa Gas (Ruas Cirebon - Semarang dan Ruas KEK Sei Mangkei - Dumai)	Provinsi Jawa Barat - Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Sumatera Utara - Provinsi Riau
197.	Gasifikasi Batu Bara di Tanjung Enim	Provinsi Sumatera Selatan
198.	Pembangunan Fasilitas <i>Coal to Methanol</i> di Kutai Timur	Provinsi Kalimantan Timur
199.	Pembangunan Bahan Bakar Hijau (<i>Green Diesel Bio Refinery Revamping</i> dan Hidrogenasi CPO RU IV Cilacap, <i>Green Refinery</i> RU III Plaju, Katalis Merah Putih Pupuk Kujang Cikampek)	Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Jawa Barat
200.	Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS, dan <i>Compresion (UCC Project)</i> di Teluk Bintuni	Provinsi Papua Barat
201.	Pengembangan <i>Biofuel</i> dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro	Provinsi Jawa Timur
K. Sektor Teknologi		
202.	Percepatan Pembangunan <i>Technopark</i>	Nasional
203.	Proyek Satelit Multifungsi	Nasional
204.	Pengembangan <i>Drone Male</i> Kombatan (<i>Male Unmanned Combat Aerial Vehicle</i>)	Nasional
205.	Pengembangan Teknologi Produksi IVO dan Bensin Sawit dengan Katalis Merah Putih yang Terintegrasi dengan Kebun Rakyat	Nasional
206.	Pengembangan Industri Garam	Nasional
207.	Palapa Ring Integrasi	Nasional
L. Sektor Pendidikan		
208.	Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia	Provinsi Jawa Barat
M. Sektor Pariwisata		
209.	Proyek Pariwisata Seribu Pulau di Kepulauan Seribu	Provinsi DKI Jakarta
N. Sektor Perkebunan		
210.	Pembangunan Kelapa Dalam dan Industri Turunannya	Provinsi Papua Barat

II. PROGRAM

NO.	DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
1.	Program Ketenagalistrikan	Program Ketenagalistrikan terdiri dari: a. Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) (daftar proyek diatur dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan); b. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap Nasional; c. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Skala Besar di Kepulauan Riau; dan d. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air Sungai Mentarang di Kalimantan Utara.
2.	Program Pemerataan Ekonomi	Percepatan Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Perhutanan Sosial, Reforma Agraria, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, dan Peremajaan Kebun Rakyat.
3.	Program Pengembangan Kawasan Perbatasan	10 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Jalan Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Paralel Perbatasan Provinsi Kalimantan Utara dan Jalan Akses Perbatasan Kalimantan Utara.
4.	Program Pengembangan Jalan Akses <i>Exit Toll</i>	58 lokasi Exit tol pada 10 Provinsi.
5.	Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Fokus lokasi di DPSP Danau Toba, DPSP Borobudur, DPSP Mandalika, DPSP Labuan Bajo, dan DPSP Likupang.
6.	Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	Daftar proyek diatur dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
7.	Program Pembangunan <i>Smelter</i>	Program Pembangunan <i>Smelter</i> terdiri dari: a. Pembangunan 8 (delapan) Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Nikel oleh:

NO.	DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
		<ol style="list-style-type: none"> 1) PT Artabumi Sentra Industri di Morowali, Sulawesi Tengah; 2) PT Wanxiang Nickel Indonesia di Morowali, Sulawesi Tengah; 3) PT Artha Mining Industry di Bombana, Sulawesi Tenggara; 4) PT Ceria Nugraha Indotama di Kolaka, Sulawesi Tenggara; 5) PT Macika Mineral Industri di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara; 6) PT Virtue Dragon Nickel Industry di Konawe, Sulawesi Tenggara; 7) PT Aneka Tambang P3FH di Halmahera Timur, Maluku Utara; dan 8) PT Aneka Tambang Niterra Haltim di Halmahera Timur, Maluku Utara. <p>b. Pembangunan 2 (dua) Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Bauksit oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) PT Dinamika Sejahtera Mandiri di Sanggau, Kalimantan Barat; dan 2) PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (ekspansi) di Ketapang, Kalimantan Barat. <p>c. Pembangunan 2 (dua) Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Tembaga oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur; dan 2) PT Amman Mineral Industri di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. <p>d. Pembangunan 1 (satu) Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Pasir Besi dan Vanadium oleh PT Alchemist Metal Industry di Halmahera Utara, Maluku Utara.</p> <p>e. Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Nikel Terintegrasi dengan Penambangan:</p>

NO.	DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
		<p>1) Smelter PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia dan Tambang PT Vale Indonesia Blok Bahodopi di Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah; dan</p> <p>2) Smelter PT Kolaka Nikel Indonesia dan Tambang PT Vale Indonesia Blok Pomala di Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara.</p> <p>f. Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Nikel Terintegrasi dengan Penambangan serta Kawasan Industri dalam rangka Pengembangan EV Battery Nasional PT Aneka Tambang Group, PT Industri Baterai Indonesia, serta mitranya di Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara.</p>
8.	Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional/ <i>Food Estate</i>	Daftar proyek diatur dalam Peraturan Presiden tentang Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional Melalui Pengembangan Kawasan <i>Food Estate</i> .
9.	Program Pengembangan <i>Superhub</i>	Bali - Nusa Tenggara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Integrasi PT Pelindo I, PT Pelindo II, PT Pelindo III, dan PT Pelindo IV ke dalam PT Pelindo II.
10.	Program Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan dan Peraturan mengenai Ibu Kota Negara	<p>Program terdiri dari:</p> <p>a. Percepatan Pembangunan Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara dan Infrastruktur Pendukung Ibu Kota Negara yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara beserta perubahannya;</p> <p>b. Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemasang;</p>

NO.	DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
		c. Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan; d. Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan; dan e. Percepatan Pengembangan Wilayah Lainnya yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.	Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus	Kawasan Ekonomi Khusus yang ditetapkan oleh Presiden.
12.	Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit	Integrasi Grup PT Perkebunan Nusantara melalui pembentukan SugarCo, PalmCo, dan SupportingCo.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Iktut Hadi Priatna
NIP 197405071999031002